



News-Letter

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 12/NL/12/2016

Desember 2016



**Kementan Bantu Informasi Petani
Lewat Teknologi Aplikasi TANAM**

**Kementan Harapkan Poso
Jadi Lumbung Pangan Sulteng**



Pemerintah Berikan Penghargaan APN
Untuk Memotivasi Untuk Terus
Berkarya **03**

Kementan Bantu Informasi Petani Lewat
Teknologi Aplikasi TANAM **04**

Presiden Harapkan Barantan Agar
Tingkatkan Kualitas Pengawasan **06**

Presiden RI: "Indonesia Berpotensi
Jadi Lumbung Pangan Dunia" **07**

Untuk Sejahterakan Petani
Kementan Terapkan Sistem Resi
Gudang Online **08**

Kementan Buktikan Tingkat Kepatuhan
Pada Pelayanan Masyarakat **10**

Kementan Harapkan Poso Jadi
Lumbung Pangan Sulteng **11**

Gertam Cabai Jadi Solusi
Penyedia Cabai Di Tingkat
Rumah Tangga **13**

2 Upaya Kementan Untuk
Tingkatkan Produksi Pangan **15**

Kementan Targetkan Tapin Dapat
Swasembada Untuk Penuhi Kebutuhan
Daerahnya **17**

Agar Kalteng Dapat Mandiri Pangan
Kementan Lakukan Program Buka
Lahan Baru **19**

Tiga Pakar Pangan Patahkan Pendapat
Dr. Suryono Wiyono **21**

Targetkan Harga Protein Murah
Kementan Keluarkan Aturan Bobot
Sapi Bakalan **22**

Untuk Atasi Masalah Unggas
Kementan Lakukan Revisi Permentan
No. 26/2016 **24**

Tetapkan Langkah Aksi Percepatan
Kegiatan Untuk Peningkatan Produksi
Dari Kegiatan **25**

Pengarah
Kepala Biro Humas dan Informasi
Publik Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian



Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara Jakarta

Pemerintah Berikan Penghargaan APN Kepada Figur Berprestasi Untuk Terus Berkarya

“Para pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian diharapkan untuk tidak berhenti berkarya untuk bangsa. Pemerintah memberikan penghargaan karena mengakui peranan mereka dalam upaya memajukan sektor pangan nasional. Untuk itu para penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk terus berkarya dan menginspirasi masyarakat agar dapat lebih produktif”

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya dan prestasi luar biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha, Presiden RI sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kepada figur - figur berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan.

“Kepada para tokoh penerima penghargaan ini hendaknya bisa menularkan ilmunya supaya menginspirasi yang lain agar semua rakyat semua produktif. Sedangkan bagi para pemangku kepentingan diharapkan pula untuk tidak berhenti berkarya untuk bangsa” kata Presiden Joko Widodo saat menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara Jakarta (30/11).

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dilakukan secara simbolis oleh Presiden kepada sejumlah perwakilan penerima. Turut mendampingi Presiden selain Menteri Pertanian, ada juga Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan dan Juru Bicara Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan apresiasinya kepada seluruh penerima penghargaan ini karena telah berperan besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional hingga akhirnya mereka dipilih sebagai penerima penghargaan untuk bertemu langsung dengan Presiden.

“Penerima ini harus bangga karena tokoh-tokoh yang menerima penghargaan telah melewati proses pengusulan dan penilaian secara berjenjang dengan memperhatikan keunggulan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya” ujar Mentan.

Mentan menegaskan, penghargaan tersebut diberikan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreatifitas serta partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dan memotivasi dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di daerah. Karena keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, dari lintas sektor.

Penghargaan APN sudah dilaksanakan sejak tahun 1979 yaitu melalui Perlombaan Intensifikasi Pertanian, dan

terus disempurnakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, khususnya di bidang ketahanan pangan. Penghargaan yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan merupakan penghargaan prestige, karena untuk memperolehnya melalui proses panjang mulai dari verifikasi ditingkat kabupaten, terus diprovinsi sampai ke tingkat pusat. Tim verifikasi melibatkan Tim Independen dari berbagai profesi seperti akademisi, organisasi masyarakat, media dan lain-lain.

Pada tahun 2016 Penerimaan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) penerima penghargaan APN terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

1. Pelopor Ketahanan pangan sebanyak 5 penerima dengan kriteria perseorangan (bukan tokoh organisasi formal) yang merintis usaha baru (inovasi) dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya teknologi dan sumber daya sosial di daerah/wilayahnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

2. Pemangku Ketahanan pangan sebanyak 3 penerima, yaitu perseorangan yang menjadi tokoh masyarakat setempat/ adat (bukan PNS/ pejabat pemerintah, bukan isteri/suami pejabat pemerintah), mempunyai pengaruh besar, kharisma dan berhasil menggerakkan masyarakat untuk melestarikan dan memperbaiki adat dan budaya lokal (local wisdom) dalam melaksanakan pemberdayaan, penguatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan

ketahanan pangan.

3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan sebanyak 30 penerima, terdiri dari : 10 kelompok/gabungan kelompok pelaku produksi pangan; 9 kelompok/gabungan kelompok pelaku pemberdayaan masyarakat; dan 11 kelompok pelaku pengembangan pangan olahan/ perakitan teknologi pangan yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/pemberdayaan masyarakat/pengembangan industri pangan olahan/ perakitan teknologi pangan dalam

mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

4. Pelayanan Ketahanan Pangan, sebanyak 17 penerima terdiri dari : 8 orang penyuluh/pendamping; 3 orang peneliti; 6 pengawas/medik veteriner dan pengendali organisme pengganggu tanaman (popt) yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan ketahanan pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya dan/atau prestasi luar biasa.

5. Pembina Ketahanan Pangan sebanyak 18 penerima terdiri dari : 3 Gubernur; 5 Bupati/ Walikota dan 10 Kepala Desa/ Lurah yang berhasil menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, dan meningkatkan produksi pangan serta mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.



Mentan Andi Amran Sulaiman memberisambutan pada acara peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pertanian Modern di gedung Balai Penelitian Pertanian Kota Bogor

Kementan Bantu Informasi Petani Lewat Teknologi Aplikasi TANAM

“Aplikasi TANAM menyediakan informasi yang meliputi sentra produksi, kesesuaian lahan, kesesuaian varietas dan sarana produksi pertanian berupa informasi penyedia benih, pupuk dan alat mesin pertanian. Aplikasi tersebut menyediakan informasi dasar pertanian tentang teknologi pengelolaan lahan, varietas, budidaya, alsintan dan infrastruktur pendukung lainnya”

Pemerintah RI mendorong kemajuan pertanian nasional berbasis teknologi untuk mendukung akses petani terhadap informasi pertanian terkini, cepat, dan akurat memanfaatkan aplikasi berbasis Android terintegrasi dengan Google Map. Oleh karena itu Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengembangkan aplikasi informasi pertanian modern berbasis smartphone. Aplikasi yang diberi nama “TANAM” (Teknologi Pertanian Modern) tersebut secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pertanian.

“Kondisi kemajuan teknologi informasi saat ini menciptakan suatu peluang untuk menyampaikan inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat secara

lebih murah dan efektif. Badan Litbang Pertanian memanfaatkan peluang itu dengan membuat aplikasi sistem informasi berbasis smartphone yang terintegrasi dengan Google Map. Saat kita mengklik terlihat varietas apa yang cocok didaerah itu,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pertanian Modern di gedung Balai Penelitian Pertanian Kota Bogor (22/12).

Mentan menerangkan aplikasi TANAM menyediakan informasi dari “hulu” hingga “hilir” yang meliputi sentra produksi, kesesuaian lahan, kesesuaian varietas dan sarana produksi pertanian berupa informasi penyedia benih, pupuk dan alat mesin pertanian. Aplikasi tersebut menyediakan informasi dasar pertanian tentang teknologi pengelolaan lahan, varietas, budidaya, alsintan dan infrastruktur pendukung lainnya. Aplikasi yang terintegrasi dengan Google Map, sehingga pebisnis jagung dapat mengetahui tingkat kesesuaian lahan

yang ditanami jagung, varietas yang direkomendasikan, alsintan dan pupuk yang dibutuhkan. Dengan aplikasi tersebut petani juga akan mengetahui keahlian penyuluh, peneliti, dosen dan staf dinas yang online.

"Untuk sementara ini aplikasi memuat komoditas padi, jagung dan kedelai. Namun kedepan aplikasi akan membuat komoditas pertanian strategis lainnya. Tersedia juga layanan tanya jawab dengan 128 profesor dan dokter pertanian. Aplikasi ini menyediakan media konsultasi online antara petani, penyuluh, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan aplikasi ini, petani akan mengetahui keahlian penyuluh, peneliti, dosen dan staf dinas yang online. Melalui aplikasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk pencapaian kedaulatan pangan. Kita bisa mengetahui bawang ada didaerah mana, akan menekan disvarietas harga antara di kota dengan langsung didesa harganya" terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa dengan aplikasi smartphone petani bisa mengakses dan mengetahui varietas apa yang cocok ditanam daerahnya, sehingga nantinya bisa menghindari gagal panen dan produksi. Karena biasanya orang itu asal tanam saja, seharusnya penanaman harus berdasarkan keunggulan komparatif suatu daerah, alat itu begitu di klik, akan diketahui apa varietas yang cocok dan jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dan langsung kembangkan, bahkan bisa di connection dengan Toko Tani Indonesia (TTI) sehingga nantinya bisa diketahui dimana keberadaan bawang, cabai, jagung, diseluruh Indonesia dan berapa jumlahnya. Ini merupakan salah satu cara menyelesaikan memperpendek rantai pasok dan disparitas harga, dan ini solusi yang terbaik.

Mentan menambahkan aplikasi smartphone bisa menjadi salah satu grand desain 2017 yang harus dikembangkan terus menerus, sehingga kedepan bisa mendeteksi komoditi strategis yang ada di seluruh Indonesia, tentang berapa jumlah dan harganya dimasing daerah, sehingga petani bisa menjual lebih baik dan konsumen bisa mendapatkan harga yang baik juga. Dengan demikian bisa mengurangi inflasi dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Mentan, sebagian besar petani sudah terbiasa memanfaatkan smartphone yang merupakan bagian dari 56% penduduk Indonesia yang menggunakan smartphone, namun belum tersedia aplikasi yang tepat bagi para petani sehingga memberi peluang bagi pemerintah melalui Litbang Pertanian untuk bertukar informasi secara



interaktif. Dengan aplikasi tersebut diharapkan membantu petani di Indonesia untuk mengembangkan lahan lebih baik ditanam komoditas apa. Lahan strategis harus diutamakan menggunakan aplikasi itu sehingga pihak kementerian pertanian mendedukasi petani tanpa bertatap muka.

"Jadi dengan aplikasi ini diharapkan akan lebih efektif petani dalam menggarap lahannya, saya juga mengharapakan aplikasi ini mengembangkan roadmap atau peta jalan yang sinergi dengan pelaku usaha, misalnya untuk jagung menargetkan produktivitas 20 ton per hektar, padi 20 ton per hektar dan kedelai hingga lima ton per hektar. Tidak hanya komoditas ini, tapi untuk semua komoditas pangan harus ada peta jalan target produktivitasnya, keberadaan sistem informasi pertanian modern berbasis smartphone harus dapat menggetarkan dunia karena melalui aplikasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk pencapaian kedaulatan pangan" ujar Mentan.

Mentan mencontohkan dengan kenaikan produksi 1 komoditas yakni jagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nantinya jagung terus diekspor sehingga Indonesia bisa menghidupi atau memberi makan Asia. Bahkan ke depan pangan Indonesia menguasai dunia. Diharapkan Indonesia tidak mengimpor mesin pertanian, sebab banyak potensi SDA dan SDM yang dapat dioptimalkan.

"Untuk itu mulai 2017 ditargetkan swasembada dan tidak impor untuk jagung, tahun 2019 untuk gula konsumsi dan kedelai, tahun 2025 untuk gula industri, tahun 2026 untuk daging sapi, dan tahun 2033 untuk bawang putih. Apabila ini mampu diwujudkan, maka di tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia" ucap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balitbangtan, Muhammad Syakir mengatakan tujuan Balitbangtan meluncurkan aplikasi smartphone

sebagai salah satu refleksi sejauhmana inovasi teknologi dapat berkontribusi mendukung program Kementan.

"Walaupun seluruh program Balitbangtan dikawal BPTP, namun capaiannya masih perlu di upayakan dan didorong lebih kuat untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat guna mendukung program strategis pertanian "kata Kepala Balitbangtan.

Kepala Balitbangtan menjelaskan dengan aplikasi tersebut, semua informasi pertanian bisa diakses dan petani bisa berkomunikasi dengan penyuluh dan peneliti. Aplikasi tersebut masih awal sehingga baru beberapa komoditas yang bisa diakses, namun sambil berjalan semua komoditas unggulan akan bisa diakses juga. Untuk sementara aplikasi tersebut masih untuk Android dan baru memuat komoditas padi, jagung dan kedelai. Namun ke depan akan dikembangkan untuk pengguna smartphone dengan platform iOS serta memuat informasi komoditas pertanian strategis lainnya.

Kepala Balitbangtan menambahkan, dengan mengakses aplikasi pertanian itu akan diketahui komoditas yang cocok dan dikembangkan petani di daerahnya, mengenai jenis pupuk, bagaimana mengaplikasikannya, dimana mendapatkan infrastruktur, varietas apa yang akan dikembangkan, berapa dosis pupuk, berapa jumlah alsintan yang ada di daerah tersebut, semua bisa diketahui.

"Bahkan alat ini akan di koneksikan dengan audio visual, sehingga Pak Mentan bisa berkomunikasi langsung dengan peneliti Balitbangtan memberikan pengarahannya untuk mendorong percepatan capaian program Kementan. Karena Balitbang memang berkewajiban memfasilitasi dan ingin menyiapkan inovasi percepatan program pengawalan melalui tersentralisasi," ujar Ka Balitbangtan



Presiden Harapkan Barantan Agar Tingkatkan Kualitas Pengawasannya

"Upaya pengawasan barang ilegal yang masuk harus terus dilakukan guna menjaga berbagai kemungkinan masuknya bahan pangan berbahaya yang dapat menghancurkan produk pangan di dalam negeri. Maka langkah pengawasan menjadi sangat penting untuk terus di tingkatkan kualitas pengawasannya"



Salah satu target Pemerintah RI adalah membangun negara Indonesia dimulai dari perbatasan dalam kurun 2 tahun. Maka Presiden memberikan apresiasi terhadap perkembangan layanan yang dilakukan oleh Karantina Pertanian dengan membangun 7 pos perbatasan Indonesia dengan negara luar, salah satunya di Entikong, Kalimantan Barat.

"Langkah penguatan pengawasan itu merupakan bagian program pemerintah dalam membangun bangsa yang dimulai dari daerah perbatasan. Sudah 2 tahun kita canangkan pembangunan di perbatasan dan sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup baik," kata Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Stasiun Karantina Pertanian Entikong (21/12).

Presiden berharap selesainya pembangunan perbatasan ini, memiliki dampak peningkatan ekonomi yg besar di Entikong. Selanjutnya perlu dibangun segera kawasan pabean dengan sistem kuota sehingga tidak ada penyelundupan sehingga negara mendapat income dan masyarakat juga mendapat membawa produk ke Malaysia sesuai ketentuan yang ada.

Presiden juga menyampaikan apresiasi

atas kinerja dari Badan Karantina Pertanian yang melakukan langkah langkah pengawasan dan pencegahan terhadap setiap masuknya bahan pangan ilegal dari negara negara tetangga yang berdekatan dengan perbatasan. Untuk itu Diharapkan agar ke depan upaya pengawasan ketat yang dilakukan Badan Karantina Pertanian di daerah perbatasan terus dilakukan serta mengupayakan langkah cepat peningkatan ekonomi di daerah perbatasan, termasuk peningkatan produksi hasil pangan.

"Kita beri apresiasi setiap upaya badan karantina dalam menjaga masuknya bahan pangan ilegal dari negara tetangga, dan ke depannya langkah pengawasan perlu terus di tingkatkan, upaya pengawasan barang ilegal yang masuk harus terus dilakukan guna menjaga berbagai kemungkinan masuknya bahan pangan berbahaya yang dapat menghancurkan produk pangan di dalam negeri. Maka langkah pengawasan ini menjadi sangat penting untuk terus di tingkatkan kualitas pengawasannya," ucap Presiden.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, maka Badan Karantina Pertanian telah melaksanakan pemusnahan terhadap benih cabai ilegal asal Cina yang diduga sangat membahayakan produksi petani cabai di Indonesia karena mengandung bakteri *Erwinia chrysanthemi*. Bakteri tersebut merupakan organisme

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) golongan A1 atau belum pernah ada di Indonesia. Badan Karantina Pertanian telah memusnahkan setidaknya 2 kilogram benih cabai asal Cina.

Benih cabai yang mengandung bakteri *Erwinia chrysanthemi* tidak dapat ditanam di Indonesia. Sehingga pihak Badan Karantina Pertanian memusnahkan benih tersebut. Bakteri *Erwinia chrysanthemi* dapat menimbulkan kerusakan atau kegagalan produksi hingga mencapai 70 persen. Selain itu bakteri itu juga dapat menyerang dan menular pada tanaman-tanaman lain yang ada di Indonesia termasuk bawang.

Tim Pengawasan dan Penindakan (P2) Badan Karantina Pertanian menemukan benih ilegal itu atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor. Imigrasi menangkap 4 warga negara asing (WNA) asal Cina pada 8 November 2016. Mereka bercocok tanam cabai. Aktivitas Tersebut melanggar Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.

Pihak Badan Karantina Pertanian menangkap empat tersangka pada 15 November lalu. Mereka sempat menanam cabai tersebut di lahan pertanaman cabai perbukitan Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Benih cabai yang ditanam itu positif terinfeksi bakteri *Erwinia chrysanthemi*.

Beberapa waktu lalu, Badan Karantina Pertanian juga melakukan hal yang sama terhadap temuan cabai berbakteri asal Cina. Sebelumnya, Badan Karantina juga menyapakan benih itu dengan cara dibakar. Temuan ini adalah kali kedua Badan Karantina.

Badan Karantina Pertanian juga telah memusnahkan 1 kilogram benih bawang daun dan sawi hijau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dengan incinerator di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta.

Mengingat pentingnya pengawasan terhadap produk pangan dari luar, DPR RI juga telah mengusulkan RUU Badan Karantina Nasional atau RUU Karantina untuk menjaga keamanan pangan di Indonesia sekaligus memproteksi produsen pangan domestik dari serbuan produk asing ke Tanah Air. RUU Karantina yang diusulkan merupakan revisi dari UU No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, karena dinilai sudah tidak relevan, draft RUU Karantina saat sekarang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR untuk menjadi RUU Karantina.

RUU Karantina yang lama berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai. RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut tidak relevan dan implementasinya tidak optimal sehingga direvisi. Karena karantina selalu dibelakang Bea Cukai dan sehingga perannya tidak signifikan. Melalui revisi tersebut akan menguatkan keberadaan karantina, baik kelembagaan maupun fungsinya dalam menseleksi bahan pangan yang memenuhi persyaratan.

Presiden RI: "Indonesia Berpotensi Jadi Lumbung Pangan Dunia"

"Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki lahan berjuta-juta hektare. Tanah yang subur, sumber daya air yang melimpah dan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Semua potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dan dibutuhkan upaya ekstra lebih dari yang pernah dilakukan sebelumnya"

Pemerintah optimis Indonesia mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lumbung pangan dunia. Apalagi sumber daya alam dan tanah Indonesia mendukung produksi pangan dan bisa bersaing dengan negara lain, dengan demikian Indonesia berpotensi menjadi lumbung pangan dunia di masa datang.

"Kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk menjadi lumbung pangannya dunia, harapan itu dapat terwujud apabila negeri ini dapat memanfaatkan luasnya lahan yang dimiliki dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan" kata Presiden Joko Widodo saat usai Penganugerahan Penghargaan Adhikarya Pangan (APN) 2016 di Istana Negara, Jakarta, (30/11).

Presiden menyatakan Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki lahan berjuta-juta hektare berpeluang besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mewujudkannya harapan tersebut maka diperlukan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, penyuluh, peneliti, dan petaninya sendiri untuk bisa bekerja bersama-sama.

"Indonesia memiliki lahan berjuta-juta hektare yang dapat digunakan untuk menanam padi, jagung, dan tebu dengan produktivitas pangan yang tinggi. Lumbung pangan dapat terwujud apabila para pemangku kepentingan serius mengerjakan itu. Kalau niatnya kuat, maunya juga kuat, kemauan kuat, rampung urusan-urusan seperti itu," ucap Presiden.

Presiden mengungkapkan tanah yang subur, sumber daya air yang melimpah dan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi potensi sendiri bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pertanian bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Semua potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal



Presiden Joko Widodo saat usai Penganugerahan Penghargaan Adhikarya Pangan (APN) 2016 di Istana Negara, Jakarta

dan dibutuhkan upaya ekstra lebih dari yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Kita masih memiliki banyak peluang untuk menjadi lumbung pangan dunia. Dengan potensi alam yang dimiliki Indonesia maka banyak sekali potensi yang bisa kita

manfaatkan. Namun demikian, hal itu tak bisa dicapai tanpa berbuat apa-apa. Potensi yang melimpah tidak akan terwujud tanpa ada tindakan nyata "ungkap Presiden.

Presiden memaparkan banyaknya potensi yang melimpah selama ini justru tidak tergarap dengan baik dan justru terkesan nganggur. Dicontohkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat terdapat lahan seluas 4,2 juta hektare yang dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Lahan yang itu sangat bagus untuk tanam jagung, tebu, padi.

"Kalau ditanam padi saja, katakanlah 1 hektar bisa 5 ton 6 ton dikalikan saja 6 kali 4 sudah 24 juta ton setahun sekali panen karena air melimpah di sana bisa tiga kali panen hitung saja. maka hasilnya 72 juta ton, sama dengan produksi nasional kita hanya di satu kabupaten. Tapi karena tidak fokus dan tidak serius mengerjakan itu maka problem di lapangan juga banyak" kata Mentan.

Menurut Presiden, Pemerintah tengah menyiapkan lahan seluas 9 juta hektar untuk para petani, namun hal itu belum dapat dibagikan karena harus menyiapkan skema pembagian yang berkeadilan. Karena kalau tidak ada sistem yang baik, petani bisa menyalahgunakan lahan yang diberikan.

"Kami belum bagi karena ingin tahu sistemnya benar dan diberikan itu nanti bisa berproduksi. Ini yang sampai sekarang belum ketemu jalannya. Jadi saya stop dulu, jangan dulu diberikan

sebelum punya skema yang benar," tukas Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah sekarang sedang fokus membangun waduk, embung, dan kantung air. Apalagi Indonesia mempunyai sumber daya air yang banyak, sehingga harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat dan tidak mengakibatkan banjir.

Presiden mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Pertanian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar tahun depan mulai konsentrasi untuk membuat kantong air/embung sebanyak-banyaknya, karena kuncinya memang di air. Pemerintahpun telah membagikan 40 ribu pompa air untuk dibagi pada masyarakat

"Kalau airnya ada, berarti sepanjang tahun bisa berproduksi, tidak hanya menunggu hujan saja. Kunci-kunci seperti itu yang bisa kita kerjakan. Karena problem lapangan juga banyak. inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi yang harus kita selesaikan di lapangan, misalnya, dengan memberikan pintu air, menaikkan tanah, atau memberikan pompa air" ujar Presiden.

Terkait upaya tersebut, Presiden mengatakan, dana desa sangat penting untuk pembangunan di desa. Oleh karena itu, pemerintah selalu meningkatkan anggaran untuk dana desa setiap tahunnya. Pemerintah juga akan terus

mengecek dan mengontrol penggunaan dana desa agar bisa efektif untuk membangun berbagai infrastruktur pedesaan.

"Saya sudah memerintahkan Menteri Desa untuk meningkatkan anggaran dana desa dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan mengontrol terus penggunaan Dana Desa agar dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan, baik membangun irigasi, maupun pembuatan kantong air/embung." kata Presiden.

Kepada Menteri Pertanian, Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena tahun 2016 Indonesia tidak impor beras, impor jagung turun 60%. Bawang dan cabe 2016 sudah tidak impor lagi.

"Usahakan tidak impor lagi, karena sumber daya alam kita sudah cukup memadai Tahun depan tidak impor lagi, 2018 sudah enggak impor jagung, janji ini Pak Menteri dengan saya" kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga melaporkan bahwa terjadi peningkatan ketahanan pangan Indonesia di tahun 2016, dimana secara khusus ada peningkatan produksi dari komoditas padi, jagung, cabe, dan bawang.

"Tahun ini, karena gerakan kita bersama, atas perintah Bapak Presiden, padi/beras kita tidak impor lagi tahun 2016. Bawang, cabe tidak impor lagi. Kemudian jagung impor turun 60 persen sampai dengan hari ini," ujar Mentan.

Untuk Sejahterakan Petani Kementan Terapkan Sistem Resi Gudang Online

"Sistem Resi Gudang bisa jadi jalan tengah atas kurangnya kesejahteraan petani gabah, Penggunaan resi gudang integrasi lelang online tersebut bisa membuat petani bisa menjual langsung tanpa perantara atau tengkulak, ke pembeli dengan harga Penawaran tertinggi sebagaimana lelang pada umumnya"

Guna memangkas rantai pasok terlalu panjang yang selama ini dianggap jadi biang tingginya bahan pangan, Pemerintah Indonesia kembali menghidupkan Sistem Resi Gudang (SRG). Resi Gudang sendiri merupakan

sarana membantu petani untuk bisa menekan kerugian saat harga komoditas yang diproduksinya turun, dengan terlebih dahulu menjaminkan produksinya ke resi gudang. Dari penjaminan itu petani akan mendapatkan surat berharga atau resi jaminan yang bisa diagunkan untuk mendapatkan kredit bank. Sistem Resi Gudang nantinya akan diintegrasikan dengan perdagangan online lewat Pasar

Lelang Komoditas (PLK).

"Penggunaan resi gudang integrasi lelang online ini bisa membuat petani bisa menjual langsung tanpa perantara atau tengkulak, ke pembeli dengan harga penawaran tertinggi sebagaimana lelang pada umumnya. Resi gudang ini kami sudah hitung nasional, dari tambahan margin keuntungan petani Rp 660 per



Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan sambutan pada acara peresmian Integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

kilogram seluruh Indonesia, dikalikan 79 juta ton (produksi gabah), ada Rp 52 triliun keuntungan petani," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan peresmian Integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam rangka meningkatkan akses pasar bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, (5/12).

Dalam acara yang dihadiri Gubernur Jawa Barat, Wakil Bupati Cianjur, Dirut PT Pertani, Direktur Logistik Bulog dan Otoritas Jasa Keuangan, Deputi BI, Mentan menyebutkan resi gudang bisa jadi jalan tengah atas kurangnya kesejahteraan petani gabah, meski harga beras terbilang cukup tinggi.

"Sebelumnya, pemerintah pun telah menetapkan harga dasar dan harga atap. Misalnya bawang merah telah ditetapkan harga dasarnya Rp 15.000/kg, sehingga dengan harga ini petani tidak akan merugi akibat harga jual yang murah," kata Mentan.

Mentan menuturkan sesuai arahan langsung dari Presiden, Kementanpun melakukan langkah cepat dalam meningkatkan produksi pangan. Dari arahan tersebut pihak Kementan menterjemahkannya dalam sejumlah program strategis terutama dalam setiap langkah UPSUS. Sejumlah Program UPSUS telah membuahkan hasil yang cukup baik.

Pertama, dengan adanya program UPSUS, pemerintah mampu meningkatkan indeks pertanian melalui rehabilitasi irigasi dan membangun embung. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan indeks pertanian dan pemaksimalan teknologi. Kedua, meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui bantuan alat mesin pertanian dalam jumlah besar seperti traktor, alat tanam dan traktor sehingga lahan cepat ditanami kembali, dengan combine harvester proses panen dilakukan lebih cepat dan murah, lossis pun menurun. Dengan pompa air, masalah kekeringan cepat teratasi. Ketiga, meningkatkan produktivitas dari 5 ton menjadi 7 hingga 10 ton melalui bantuan benih unggul.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa sejumlah program upaya khusus(UPSUS) yang dijalankan oleh pihak Kementan saat sekarang sudah menunjukan arah yang baik. Dengan adanya UPSUS Indonesia mampu melewati ancaman dampak El Nino 2015 dan La Nina 2016. Saat El Nino 1998 dengan jumlah penduduk 201,54 juta jiwa dan kekuatannya lebih besar dibanding El Nino 2015, Indonesia melakukan impor



beras 7,1 juta ton. Demikian juga saat La Nina 1999 lebih kuat dibanding 2016, Indonesia melakukan impor beras 5,04 juta ton.

"Kami akui, banyak yang meragukan dengan terjadinya el nino dan la nina. Sebab, berkaca pada tahun 1997 hingga 1999, di mana Indonesia harus melakukan import beras hingga 12 juta ton. Ini yang selalu diingat oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila tidak ada upaya khusus, dengan penduduk 258 juta jiwa tahun 2016, maka dengan esktrapolasi semestinya di tahun 2015 hingga 2016 Indonesia impor beras 16,8 juta ton, namun Alhamdulillah dengan upaya khusus tahun 2016 tidak ada impor beras medium," jelas Mentan.

Mentan mengatakan, tidak hanya faktor alam yang dapat mempengaruhi ketahanan dan ketersediaan pangan. Proses alih fungsi lahan pun sangat berdampak pada hal itu. Alih fungsi lahan menjadi industri atau perumahan sehingga semakin mempersempit lahan pertanian. Alih fungsi lahan sulit dibendung namun harus ditekan sehingga perlu disiasati, salah satunya dengan cara mengoptimalkan lahan yang ada,.

"Kami telah mengantisipasi masalah alih fungsi lahan dengan menyediakan lahan sekitar 1 juta hektar. Sehingga, akan ada kelebihan tanam dan berdampak pada ketersediaan pangan. Sebenarnya, tidak hanya di Cianjur, alih fungsi lahan terjadi hampir di setiap daerah, ini perlu disiasati dengan membuka lahan baru atau mengoptimalkan lahan pertanian yang ada dengan meningkatkan produksi," kata Mentan.

Menurut Mentan, dengan pengoptimalan lahan yang biasa produksi dua kali dalam setahun menjadi tiga kali atau yang biasanya tiga kali setahun menjadi empat kali. Hasil optimalisasi tersebut membuat Indonesia memiliki persediaan satu juta

hektar lahan pertanian dengan hasil yang dapat ditampung Bulog mencapai 4,8 juta ton. Ketersediaan stok beras yang dimiliki Perum Bulog RI, diprediksi dapat memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun 2016.

"Stok beras yang ada di gudang Bulog, mencapai 1,8 juta ton, stok tersebut dapat mencukupi hingga bulan Mei hingga Juni 2017 mendatang. Ini tidak terlepas dari peningkatan produksi, dengan banyaknya kuota beras, tahun ini Indonesia tidak perlu mengimpor beras, meskipun tahun 2015 Indonesia masih mengimpor sebanyak satu juta ton. tapi kami lakukan antisipasi dengan menekan impor, sehingga ke depan Indonesia akan terhindar dari impor" ujar Mentan.

Mentan juga menyebutkan, ketersediaan stok beras itu tak lepas dari upaya Pemerintah Pusat dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di Indonesia. Di antaranya dengan memberikan bantuan sebanyak 40 ribu unit pompa air yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan akan mengimbuai sejumlah kabupaten yang menjadi lumbung padi di Jabar, untuk meningkatkan produksi dengan sistem resi gudang (SRG) sehingga dapat lebih meningkatkan stok pangan nasional, meskipun sejumlah kendala di lapangan banyak ditemukan salah satunya alih fungsi lahan.

"Namun kendala tersebut dapat diatasi sejumlah wilayah yang mengalami alih fungsi lahan dengan membuat lahan sawah baru sebagai pengganti. Sehingga ke depan lumbung padi Jabar dapat lebih meningkatkan hasil panennya yang akan ditampung di gudang SRG yang akan dibangun di daerah lain," kata Gubernur Jabar.

Kementan Buktikan Tingkat Kepatuhan Pada Pelayanan Masyarakat



Kementan menerima Penghargaan diserahkan langsung Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, diterima Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini yang hadir mewakili Kementerian Pertanian di Hotel Borobudur

“Penilaian kepatuhan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepatuhan standar pelayanan memberikan jaminan kepastian pelayanan, membuka peluang kemudahan berusaha, dan pemenuhan hak-hak masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau”

Berdasarkan penilaian Ombudsman RI terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Kementerian Pertanian menerima anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik Tahun 2016 untuk kategori Kementerian.

Penghargaan diserahkan langsung Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai disaksikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, diterima Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini yang hadir mewakili Kementerian Pertanian di Hotel Borobudur, (7/12).

Wakil Presiden mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh setiap Kementerian. Setidaknya, ada

tiga hal yang harus dipenuhi di dalam memenuhi standar pelayanan yaitu kecepatan, kualitas dan biaya.

Wakil Presiden mengingatkan kepada para penerima penghargaan baik kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah untuk selalu meningkatkan layanan publik. Wapres berharap agar birokrasi bisa dipercepat bukan diperlambat agar mencapai pemerintahan yang lebih bersih.

Wakil Presiden meminta agar Penganugerahan Predikat Kepatuhan tetap terus diselenggarakan karena penilaian kepatuhan tersebut sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepatuhan standar pelayanan memberikan jaminan kepastian pelayanan, membuka peluang kemudahan berusaha, dan pemenuhan hak - hak masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau.

Wakil Presiden menjelaskan pungutan liar (Pungli) masih terjadi karena lambatnya proses di pelayanan publik sementara masyarakat ingin proses lebih cepat sehingga membayar sejumlah uang. Jika suatu negara ingin bebas perilaku Pungli dan korupsi maka semua unsur harus meningkatkan pelayanan publik.

“Standar pelayanan publik itu mempunyai 3 acuan yaitu waktu, kualitasnya, dan biaya. Bagaimana melayani masyarakat lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Masyarakat tidak memerlukan berapa banyak birokrasi tetapi bagaimana kualitas

dan pelayanan”, ujar Wapres.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap kementerian/lembaga dalam menjalankan pelayanan publik. Penganugerahan Predikat Kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI.

Pemberian Predikat Kepatuhan telah diselenggarakan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2013. Penghargaan itu diberikan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Penganugerahan predikat kepatuhan adalah wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 11.462 produk layanan publik, 2.232 unit layanan, 2.232 responden penyelenggara, dan 5.486 responden pengguna jasa. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada 11 kementerian, 10 lembaga negara, 13 pemerintah provinsi, 15 pemerintahan kabupaten dan 16 pemerintahan kota.

Terdapat 10 variabel penilaian yang menjadi fokus Ombudsman RI, yaitu diantaranya standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas. Selain itu terdapat pelayanan

husus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi serta motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.

Pemberian penghargaan Kepatuhan Tinggi Zona Hijau yang diberikan khusus Kementan setelah dilakukan penilaian pada 56 unit pelayanan Kementerian Pertanian, diantaranya

54 unit pelayanan Barantan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau PPVT, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.



Kementan Harapkan Poso Jadi Lumbung Pangan Sulteng

"Kabupaten Poso yang dikenal dunia sebagai daerah rawan konflik dan aksi teror diharapkan akan dapat dikenal menjadi daerah lumbung pangan, apalagi Poso menjadi salah satu daerah yang sukses dalam memenuhi target yang ditentukan dalam menyukseskan UPSUS Pajale"

Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah Pusat, mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang masih menangani kasus teror Poso, dan dinilai tidak aman oleh sejumlah masyarakat di luar Sulawesi Tengah. Guna membangun rasa nyaman bagi masyarakat setempat dan kepercayaan masyarakat luar bahwa Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Poso aman, berbagai kegiatanpun dilakukan oleh pemerintah pusat, diantaranya melalui Kementerian Pertanian yang memprogramkan UPSUS Pajale di Poso.

"Ini bagian dari Program NAWACITA dan sebagai Upaya pemerintah Pusat untuk mewujudkan Indonesia untuk Surplus padi, jagung dan kedelai agar terus dilakukan, programnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan Pertanian, diantaranya

cetak sawah, dan pemberian bibit dan pupuk gratis. Upaya ini dilakukan mengingat hasil panen padi di Kabupaten Poso cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas bulir padi yang dipanen", kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, usai melakukan panen raya di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir (13/12).

Kabupaten Poso menjadi salah satu daerah yang sukses dalam memenuhi target yang ditentukan dalam menyukseskan UPSUS Pajale, sehingga Mentan berharap untuk kedepannya Kabupaten Poso yang dikenal dunia sebagai daerah rawan konflik dan aksi teror dapat dikenal menjadi daerah lumbung pangan.

"Guna mengubah pandangan masyarakat tentang Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Poso khususnya, Pemerintah Pusat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat kesejahteraan masyarakat akan memberi pengaruh besar terhadap situasi keamanan di setiap daerah, tak terkecuali Kabupaten Poso" harap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kabupaten Poso sebagai salah satu daerah yang mendapat kepercayaan pemerintah untuk menyukseskan program upaya khusus padi jagung dan kedelai atau lebih dikenal dengan nama UPSUS Pajale dimana di Kabupaten Poso dilakukan cetak sawah sekitar seribu hektar lahan. Untuk itu pemerintah telah melakukan pembagian alsintan

kepada kelompok tani di beberapa daerah penghasil beras. Bantuan pemerintah pusat agar dimanfaatkan kelompok tani.

"Kementan telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat kelompok petani di Kabupaten Poso, khususnya keluarga DPO Poso, diantaranya Handtraktor, harvester, mesin tanam, bibit dan pupuk. diharapkan melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya pemerintah dalam melaksanakan UPSUS Pajale tercapai" jelas Mentan.

Mentan juga menyampaikan bahwa pemberian bantuan alat-alat bantuan pertanian untuk wilayah Poso meningkat tajam pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu karena Poso merupakan wilayah khusus dan menjadi pusat pelaksanaan percetakan sawah baru yang dikelola langsung oleh TNI.

Kepada Petani, Mentan meminta agar para kelompok tani tidak hanya fokus pada penanaman padi, namun juga menanam jenis palawija dan sayur-mayur. Dengan pencapaian hasil panen yang cukup maksimal, Kabupaten Poso harus mampu menjadi penyumbang pangan terbesar di Sulteng.

"Hari ini kita telah melakukan panen perdana dan hasilnya cukup memuaskan. Ini artinya untuk Kabupaten Poso sudah bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan yang terpenting ke depan Poso tidak lagi membeli beras dari luar," pinta Mentan.

Terkait impor, Mentan menyatakan

pertanian menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius pemerintah sejak tahun 2015 lalu. Karena itu kementerian terus melakukan berbagai upaya dan akhirnya di tahun 2016 Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

"Dalam menekan Indonesia tidak terjadi impor beras. Pemerintah terus meningkatkan produksi pertanian khususnya pada swasembada pangan, seperti padi, jagung dan kedelai (Pajala) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani" ucap Mentan

Mentan menyebutkan, bahwa sebelumnya bantuan bidang pertanian ke Sulteng sebesar 300 Miliar dan sekarang sudah bertambah menjadi 800 Miliar lebih, sehingga sangat rugi jika peningkatan swasembada pangan tidak berhasil. Bahkan kedepan Mentan menegaskan pemerintah tidak akan melakukan lagi import beras.

Mentan berharap Sulteng bisa menjadi pengekspor jagung tahun 2017, untuk itu Kementan akan memberikan bantuan terhadap petani jagung dalam peningkatan produksi jagung. Jika Sulteng dapat menjadi sumber ekspor jagung tahun depan dengan luas tanam Jagung seluas 100 ribu hektar, maka Kementan akan lebih memberikan perhatian penuh dan tetap berharap Sulteng dapat menjadi daerah penyumbang ekspor jagung tahun 2017.



Mentan, Andi Amran Sulaiman, saat melakukan panen raya di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah pusat kepada Sulteng karena luas Sulteng 1/3 luas pulau Sulawesi dan masyarakatnya 80 % petani. Tentunya juga perlu didukung terhadap program 1 juta ekor sapi.

"Masyarakat Sulteng umumnya adalah masyarakat petani dan saya harap pemerintah pusat bisa terus menyalurkan bantuan kepada petani kita ini, Kedatangan Mentan itu sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pertanian

di Sulteng. Sehingga produksi pertanian dapat meningkat sebesar 5 % di Sulawesi Tengah" tegas Gubernur Sulteng.

Gubernur Sulteng juga menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan di daerahnya, diantaranya pada bidang pertanian baik pembukaan lahan sawah baru dan distribusi benih pertanian, bantuan mesin Alsintan serta distribusi Pupuk dan peningkatan kesejahteraan petani melalui perbaikan NTP petani.





Mentan Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada acara Jambore Nasional Kader PKK 2016 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta

Gertam cabai Jadi Solusi Penyedia Cabai Di Tingkat Rumah Tangga

"Gertamcabai bertujuan menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun, maka penanaman cabai di lahan pekarangan merupakan salah satu solusi untuk membantu penyediaan cabai secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga"

Dalam rangka mendukung gerakan tanam cabai (Gertamcabai) di pekarangan halaman rumah (urban farming), Kementerian Pertanian bekerjasama dengan para kader pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di seluruh Indonesia menjadi penggerak kaum ibu menanam cabai. Guna mendukung gerakan itu, Kementan memberikan bibit cabai kepada seluruh perwakilan PKK di daerahnya masing-masing.

"Saya harapkan dukungan kader PKK menjadi penggerak kaum ibu di daerah masing-masing untuk mensukseskan Gertamcabai. Pemerintah akan mendukung 10 juta bibit cabai agar ditanam kaum ibu di pekarangan rumah masing-masing," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat acara Jambore Nasional Kader PKK 2016 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, (30/11).

Dalam acara Jambore Nasional Kader PKK yang digagas Kementerian Dalam Negeri dengan tema: 'Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menunjang Terwujudnya Ketahanan Keluarga', Mentan menerangkan Gertamcabai bertujuan menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun, maka penanaman cabai di lahan pekarangan merupakan salah satu solusi untuk membantu penyediaan cabai secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

"Kalau harga cabai naik, masyarakat sebenarnya dapat mandiri, mereka bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam cabai. Habis masak, kalau ada bijinya bisa dibuang di pekarangan atau pot, pasti menghasilkan. Cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Apalagi jumlah anggota PKK serta ibu-ibu di daerah seluruh Indonesia mencapai 160 juta. Diharapkan per rumah tangga hasilnya bisa menekan inflasi" terang Mentan.

Berdasarkan Data Kementan, Mentan menyebutkan potensi lahan pekarangan untuk Gertamcabai diperkirakan 10 juta hektar di seluruh Indonesia, dan hal itu menjadi 'potensi tersembunyi' untuk mendukung swasembada pangan, karena kaum ibu belum memanfaatkan secara maksimal.

"Pemerintah harapkan sekitar 20 persen lahan tidur di pekarangan dapat dimanfaatkan kaum ibu untuk menanam cabai. Bisa dibayangkan hasilnya secara finansial, kaum ibu dapat menghemat pengeluaran keluarga sekaligus dapat dibagikan kepada tetangga atau dijual ke pasar," ujar Mentan.

Mentan menjelaskan, melalui kerjasama Kementan dengan PKK, kenaikan harga cabai yang melonjak bisa diantisipasi. Sehingga masyarakat bisa memproduksi cabai sendiri. Dengan adanya hasil panen cabai dari halaman rumah diharapkan bisa menekan kenaikan harga cabai dan inflasi.

"Kami mengharapkan jika nanti harga cabai terus melambung para penerima bantuan bisa memenuhi kebutuhan dari pohon cabai di halaman rumah masing-masing. Kami berharap polibag berisi tanaman cabai ini bisa langsung didistribusikan ke rumah warga," jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa tanaman hortikultura seperti cabai adalah

salah satu komoditas yang komplementer dan tidak bisa digantikan oleh produk lain. Kelemahannya tidak tahan lama, sehingga harus didukung dengan peningkatan teknologi yang tepat guna. Sehingga masyarakat bisa memproduksi dan mengonsumsi cabai sendiri.

"Masyarakat kita sepertinya tidak bisa mengubah pola konsumsi yang selama ini selalu mengonsumsi produk segar. Sebenarnya masyarakat juga bisa mengonsumsi produk turunannya sebagai alternatif seperti bubuk cabai. Padahal rasanya sama, pedas juga. Makanya kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan halaman kosong di rumah" terang Mentan.

Untuk memanfaatkan halaman kosong di rumah, Mentan mengatakan telah memberikan sebanyak 10 juta bibit cabai kepada seluruh perwakilan PKK yang hadir untuk mewakili daerahnya masing-masing.

"Pemberian bibit cabai ini didorong lantaran cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Dan juga jumlah anggota PKK serta ibu-ibu daerah yang mencapai 160 juta. Dari 160 juta ibu-ibu di kali saja katakanlah hasilnya banyak, kan tinggal dikalikan cabainya per rumah tangga," ucap Mentan.

Selain mengajak para kaum ibu untuk giat menanam cabai, Mentan juga



mengimbau jika ada waktu dan lahan, maka bisa disisipkan dengan menanam sayuran di dekat rumah, misalnya, kangkung, bawang, dan sayur-sayuran lainnya di pekarangan rumah atau di polibag.

"Saat ini ada 67 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Untuk atasi harga cabai yang melonjak naik, saya ajak untuk produktif menanam cabai. Sehabis makan cabai, bijinya taruh di pot atau lempar di pekarangan rumah. Insya Allah akan tumbuh subur. Juga tanam sayur, atau bisa pelihara ayam 10 ekor sampai 20 ekor," pinta Mentan.

Selanjutnya Mentan menjelaskan

bahwa pada kondisi saat ini, pertanian di Indonesia sekarang adalah tidak ada impor beras tahun ini, kemudian bawang juga tidak impor, serta komoditas jagung impor turun sebesar 60% karena keadaannya masih sulit, dan juga menjelaskan bahwa bawang bahkan sudah mulai ekspor.

"Saya minta kepada ibu-ibu agar menjadi penggerak di daerah masing-masing, tanamkan jiwa kerja keras, apalagi jika hasil panennya bagus itu juga buat keuntungan keluarga masing-masing, saya yakin jika ini semua berjalan, tidak ada lagi keluhan dan demo mengenai ketimpangan harga pertanian," jelas Mentan.



2 Upaya Kementan Untuk Tingkatkan Produksi Pangan



Mentan Andi Amran Sulaiman saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi pangan, di Ballroom Hotel Novotel, Banjarmasin, Kalsel

“Salah satu upaya yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan produksi pangan yakni mendorong peningkatan luas tambah tanam (LTT). Selain meningkatkan LTT, mewujudkan swasembada pangan juga dilakukan dengan menggarap lahan tidur sehingga dapat ditanami komoditas pangan strategis”

Dalam rangka mengevaluasi program dan memantapkan program peningkatan produksi pangan di Banjarmasin sekaligus untuk menyempurnakan strategi peningkatan swasembada pangan dan kesejahteraan petani, maka Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan.

“Salah satu upaya yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan produksi pangan yakni mendorong peningkatan luas tambah tanam (LTT)” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi pangan, di Ballroom Hotel Novotel, Banjarmasin, Kalsel (14/12).

Mentan menerangkan, selain meningkatkan LTT, mewujudkan swasembada pangan juga dilakukan



dengan menggarap lahan tidur sehingga dapat ditanami komoditas pangan strategis.

“Lahan tidur secara nasional diperkirakan mencapai 4 juta hektar. Potensi ini harus dimanfaatkan sehingga kita dapat mengeksplor pangan,” terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi 4 juta hektar lahan tidur atau tidak optimal karena tidak produktif. Salah satunya dengan berkordinasi dengan Menteri Desa PDT. Bentuk koordinasi yang dibangun misalnya Kementerian Desa PDT membangun embung, sedangkan Kementan mengadakan benih dan pompanya.

“Nantinya, Kementerian Pertanian akan membangun sawah di daerah-daerah yang kekurangan produksi. 4 juta ini kami sinkronisasi dengan Menteri Desa, Menteri Desa membangun embung, kalau ada embungnya aku yang beri pompa, kami beri benih, kemudian kami bangun sawahnya,” kata Mentan.

Mentan mengatakan saat sekarang ada program pembangunan embung sebanyak 75.328 titik atau seluas 759.147 ha pemanfaatan air sungai sebanyak 170.483 paket atau 2,57 juta ha, long storage di 5832 titik atau 91.039 ha, pembangunan DAM-parit sebanyak 8.781 titik atau 612.068 ha, 1.018 titik atau 24.339 ha. Keseluruhan proyek tersebut membutuhkan anggaran multiyears sebanyak Rp 22,6 triliun. Program tersebut tersebar di 34 provinsi, 401 kabupaten/kota, 3287 kecamatan dan 13.829 desa.

Mentan mencontohkan daerah Kalimantan Selatan yang memiliki luas lahan sebanyak 500.000 hektar dan memiliki luas tanam 500.000 yang artinya baru 1 kali tanam dalam setahun. Pihak Kementan ingin mengoptimalkannya menjadi 2 kali dalam setahun. Untuk menggenjot produktivitas lahan, Kementan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan seperti traktor, alsintan, dan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

“Lahan yang belum optimal itu baru

dapat memproduksi 1 kali per tahun, Kami meminta lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 2 hingga 3 kali masa tanam dalam setahun. Kalau tanam yang biasa 1 kali dalam setahun jadi 2 kali dalam setahun. Kalsel sudah surplus, kita harus tingkatkan lahannya luasnya 500.000 hektar tapi luas tanamnya juga 500.000 jadi cuma 1 kali tanam, kalau misalnya minta pompa aku kasih, traktor kasih, irigasi tersier kami siapkan," imbuh Mentan.

Mentan juga menegaskan daerah-daerah seperti Kalimantan misalnya harus mandiri pangan agar tidak mengirim hasil pertanian dari daerah lain yang menjadikannya mahal karena biaya logistik. Hal itu menimbulkan inflasi di daerah.

"Kalimantan ini pulau harus swasembada padi, jagung, bawang, cabai, ini harus dipenuhi sendiri, kalau diangkut dari Surabaya biaya bisa ditanggung masyarakat itu terjadi inflasi kemiskinan meningkat, ini pertumbuhan ekonominya paling rendah," tegas Mentan.

Dalam Rakor yang digelar bersama kepala daerah Provinsi Kalsel yang dihadiri beberapa Bupati, Danrem 101/Antasari dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalsel dilakukan pula penandatanganan MoU kesanggupan peningkatan LTT antara Kementerian Pertanian, dinas pertanian dan TNI.

Dalam kesempatan yang sama, Danrem 101/Antasari, Yanuar Adil menegaskan pihak TNI - AD sanggup untuk meningkatkan LTT. Upaya yang dilakukan



yakni dengan menugaskan ke seluruh Dandim agar setiap hari turun ke lapangan sehingga laporan LTT setiap harinya tercatat. nantinya Dandim-Dandim setiap harinya harus melaporkan LTT. LTT di Kalimantan Selatan sampai saat sekarang sudah mencapai 40% - 50%.

Untuk diketahui, LTT Kalsel yakni target tanam Oktober 2016 hingga Maret 2017 sebesar 396.706 hektar dan April hingga September 2017 sebesar 205.233 hektar. Dengan begitu, target LTT Kalsel untuk satu tahun mencapai 601.938 hektar. Produksi padi di Kalsel pada tahun 2016 mencapai 2,08 juta ton atau naik 5,63% dari tahun 2015 sebesar 1,97 juta ton.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, Faturahman, mengatakan berkat Program Upaya Khusus peningkatan swasembada pangan

Kementerian Pertanian, kinerja sektor pangan Kalsel 2016 mengalami kemajuan. Di mana, Produksi jagung naik 9,63%, kedelai naik 113%, dan jagung naik 51,3%

Kadinastan Kalsel pun menyampaikan realisasi produksi padi sampai Agustus 2016 sebesar 1,5 juta ton dan sampai dengan Desember 2016 diperkirakan mencapai 2,5 juta ton gabah kering giling. Dengan produksi tersebut mampu menjaga beras lebih 2 kali lipat kebutuhan.,

Kadinastan Kalsel menambahkan selain komoditas 3 komoditas di atas, Kalsel pun mampu meningkatkan luas tanam dan produktivitas bawang merah. Saat ini, luas tanam bawang merah mencapai 360 hektar dengan produktivitas 7 ton per hektar.



Kementan Targetkan Tapin Dapat Swasembada Untuk Penuhi Kebutuhan Daerahnya

“Tapin harus mampu meningkatkan produksi pangan khususnya komoditas padi, bawang merah dan cabai agar mampu memenuhi kebutuhan padi, bawang merah dan cabai dari produksi sendiri. Tapin dapat menjadi lumbung bawang merah di Pulau Kalimantan karena dalam beberapa tahun belakangan Tapin sudah mampu mengembangkan tanaman bawang merah dan telah berhasil”



Agar daerah - daerah pinggir khususnya wilayah perbatasan mampu memproduksi pangan sendiri dan menyediakan pangan murah, maka sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian tengah melaksanakan program yang dapat membangun daerah dari pinggir yaitu program peningkatan produksi pangan di daerah pada kabupaten yang terletak di daerah pingiran salah satunya di kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Tapin ditargetkan menjadi pusat produksi tiga komoditas pangan Kalsel bahkan ke depan dapat mengekspornya ke negara tetangga, Malaysia.

“Kabupaten Tapin harus mampu meningkatkan produksi pangan khususnya komoditas padi, bawang merah dan cabai. Hal ini dimaksudkan agar Tapin mampu memenuhi kebutuhan padi, bawang merah dan cabai dari produksi sendiri. Dengan begitu, akan berdampak pada penurunan inflasi. Sebab, selama ini kebutuhan pangan didatangkan dari daerah lain, sehingga harga pangan cenderung lebih mahal.” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan Gerakan Tanam Padi sekaligus meninjau pengembangan bawang merah di Purut, Bungur, Kabupaten Tapin, (15/12).

Disela-sela kegiatan tersebut Kementan memberikan bantuan berupa combain harvester sebanyak 28 unit, alat tanam padi sebanyak 56 unit, traktor roda 4 sebanyak 12 unit dan alat pasca panen padi (power thresher) sebanyak 10 unit. Kemudian, Kementan pun memberikan tambahan bantuan berupa traktor



sebanyak 5 unit dan pompa air sebanyak 10 unit.

Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Bupati Tapin, Staf Khusus KASAD, Danrem 101/Antasari, dan para petani, Mentan mengharapkan kabupaten Tapin dapat menjadi lumbung bawang merah di Pulau Kalimantan. Harapan tersebut sangat memungkinkan karena selama ini dalam beberapa tahun belakangan kabupaten Tapin sudah mampu mengembangkan tanaman bawang merah dan telah berhasil.

“Sudah 71 tahun Indonesia merdeka,

baru saat ini masyarakat Tapin mengenal tanam bawang merah sendiri. Maka kedepan kabupaten Tapin akan menjadi lumbung bawang merah di pulau Kalimantan, dan tidak lagi mendatangkan dari Brebes atau pulau Jawa. Inilah mimpi kami dulu bahwa Kalimantan Selatan tidak lagi mengambil bawang merah dan juga cabai dari Jawa atau daerah lain. Begitu pun beras pun harus swasembada” harap Mentan.

Mentan juga berharap nantinya kabupaten Tapin dapat memenuhi kebutuhan bawang. Kementan



Mentan Andi Amran Sulaiman saat melakukan Gerakan Tanam Padi sekaligus meninjau pengembangan bawang merah di Purut, Bungur, Kabupaten Tapin

menjadikan pusat bawang merah di Kalimantan selain Kalimantan Barat adalah Tapin. Kalimantan Barat memiliki potensi produksi bawang merah sebanyak 16 ton sedangkan Tapin sebanyak 17 ton.

Menurut Mentan, luas lahan pada awal pengembangan bawang merah di Tapin hanya sebesar 4 ha. Kemudian tahun 2015, Kementerian Pertanian memberikan bantuan pengembangan untuk 100 ha. Alhasil, luas lahan bawang merah Tapin saat sekarang mencapai 410 ha dengan tingkat produksi rata-rata 11 ton/ha.

Kepada Bupati Tapin, Mentan memberi arahan untuk menambah luas tanam bawang 2017 sebanyak 200 hektar lagi agar Kalsel memiliki produksi bawang yang banyak dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Rata-rata produksinya 10 ton atau 9 ton per hektar. Dengan begitu diharapkan hasilnya tahun depan harus dapat meningkat dua kali lipat dengan perluasan lahan yang ditanami bawang.

"Pada beberapa waktu lalu saat percobaan 4 hektar penanaman bawang realisasinya mencapai 100 hektar luas lahan yang ditanami bawang. Hasilnya ini sangat menggembirakan sehingga kita dorong supaya tahun depan 200 hektar tambahan semoga sudah mencapai tahun depan 600 hektar sampai 800 hektar luas tanah yang ditanami bawang" ujar Mentan.

Menanggapi arahan Mentan, Bupati Tapin, Arifin Arpan menyampaikan apresiasi atas dorongan atau dukungan Kementerian Pertanian melalui Program Upaya Khusus Peningkatan Swasembada Pangan, sehingga kinerja sektor pertanian Tapin berkembang dengan cepat. Tapin dapat meningkatkan produksi pangan dan masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya.

Bupati Tapin memaparkan luas wilayah kabupaten Tapin seluas 2.174,95 km² dimana luas lahan padi Tapin pada tahun 2016 hanya sebesar 74.970 ha dengan tingkat produksi rata-rata 5,2 ton/ha sehingga produksinya mencapai 380.000

ton. Realisasi tanam padi sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar 11.810 ha.

"Sebesar 63% penduduk disini bekerja di sektor pertanian, dan Realisasi panen padi tahun 2016 sebesar 74.947 ha, Produksi sebesar 389.961 ton, Dengan produktivitas rata-rata 52,03 kwintal/hektar dengan sasaran tanam padi 2016/2017 seluas 84.096 ha, Kami janji dapat memenuhi pencapaian target luas tanam padi Oktober hingga Maret 2017 sebesar 86 ribu hektar," papar Bupati Tapin.

Kepada Mentan, Bupati Tapin melaporkan luasan tanam terbagi atas periode oktober - maret 61.998 ha, april-september 2017 sebesar 22.098 ha. Realisasi tanam sampai dengan 13 desember 11.810 ha (19,05 persen), dari target periode oktober-maret dan komoditas jagung 2017 sasaran tanam 1.000 ha realisasi tanam 250 ha (periode okt-maret) (25%) dan Sudah panen 277 ha (28,56) Produksi 1.388 ton (28,62%) produktivitas 50,10 kwintal/ha (100,21%) Komoditas kedelai 2017 Sasaran tanam 1.000 ha Realisasi tanam 25 ha Sudah panen 571 ha (18,88 %) Produksi 501 ton (12,74 %) Provitas 8,77 kwintal/ha (67,49 %).

"Pengembangan bawang merah di kabupaten Tapin sejak tahun 2015, mencapai 320 hektar dengan sumber dana yang berasal dari APBN, APBD dari kabupaten. Tapin serta dana dari APBD provinsi Kalimantan Selatan dan dana dari swadaya petani. Bantuan pemerintah berupa bibit bawang merah, pupuk dan obat-obatan pertanian. Pada tahun 2017 ditargetkan penanaman bawang merah seluas 363 hektar. Harapan kami dan para petani bawang di daerah ini adalah adanya tempat pengeringan bawang merah yang memadai, mengingat tempat pengeringan yang ada belum mencukupi," ucap bupati Tapin.





Agar Kalteng Dapat Mandiri Pangan Kementan Lakukan Program Buka Lahan Baru

“Kabupaten Kapuas merupakan salah satu lumbung padi di Kalteng. Kementan memprogramkan 300.000 hektar lahan untuk pertanian modern di Kabupaten Kapuas. Pembukaan lahan pertanian baru tersebut agar Kalteng dapat mandiri, program pembukaan lahan pertanian bisa dikerjakan segera untuk swasembada atau mandiri pangan”

Agar dapat berdaulat pangan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong Provinsi Kalimantan Tengah untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menargetkan Kabupaten Kapuas menjadi pusat pertanian khususnya padi organik dengan memanfaatkan lahan 300 ribu hektare di eks Pembukaan Lahan Gambut (PLG). Komoditas pangan yang harus dikembangkan dan ditingkatkan produksi mampu produktivitasnya yakni padi, jagung dan cabai.

“Kami ingin Kalimantan Tengah dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Jangan ambil pasokan pangan dari daerah luar lagi, karena rantai pasoknya terlalu panjang, akibatnya terjadi inflasi dan akhirnya terjadi kemiskinan yang tidak akan terselesaikan,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat kegiatan Tanam



Mentan Andi Amran Sulaiman saat Tanam Padi Hibrida seluas 250 ha di Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Padi Hibrida seluas 250 ha di Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalteng, (16/12).

Dalam acara yang dihadiri Gubernur Kalteng, Anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Kapuas, Mentan berharap Kalteng tidak hanya mampu mandiri pangan, akan tetapi dapat melakukan ekspor beras ke negara tetangga, Malaysia, karena ternyata Malaysia melakukan impor beras setiap tahunnya sebanyak 1,2 juta ton. InimendjadipeluangbagiIndonesiaagar dapat mengisi volume impor tersebut.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalteng dan para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Indonesia dapat membangun lahan tidur. Sehingga, Kalteng nantinya dapat mengekspor pangan tidak hanya ke Malaysia, namun ke negara-negara lain juga. Apabila ini dapat kita wujudkan, ini menunjukkan ketahanan pangan kita kuat dan ketahanan negara pun ikut kuat," harap Mentan.

Mentan mengatakan teretusnya ide tersebut karena lokasi eks PLG sudah tidak ada pepohonan dan sejumlah masyarakat sudah melakukan penanaman. Namun sekarang ini kurang mendapat perhatian sehingga perlu diambil alih dengan pertanian modern.

"Apabila memungkinkan, satu petak untuk lahan sawah di eks PLG itu akan dibuat luasnya mencapai 10 hektar, sehingga mesin besar yang bekerja. Itu pola yang sangat efektif, biaya produksi rendah tapi produksinya luar biasa. Semuanya harus organik," ujar Mentan.

Menurut Mentan untuk Kabupaten Kapuas sendiri, rencananya akan dibuka lahan seluas 300.000 hektar untuk pertanian. Kementan memprogramkan 300.000 hektar lahan untuk pertanian modern di Kabupaten Kapuas. Perencanaan program tersebut akan dimulai pekan depan bekerjasama dengan seluruh stakeholder di Kalimantan Tengah. Untuk pembuatan pertanian modern itu, Kementan akan memberikan sumbangan berupa 30 handtraktor dan 9 ekskavator kurang dari dua pekan ke depan.

"Kalteng masih mengambil beras dari SulSel dan Surabaya. Jelas angka inflasi akan berdampak naik turunnya angka kemiskinan. Sebab biaya angkut ditanggung oleh konsumen sehingga inflasi meningkat dan angka kemiskinan juga naik. Pembukaan lahan pertanian baru ini agar Kalteng dapat mandiri, Saya minta bisa dikerjakan segera untuk swasembada atau mandiri pangan.



Kabupaten Kapuas dipilih karena merupakan salah satu lumbung padi di Kalteng" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa sebelum 8 ekskavator baru diterjunkan ke lokasi eks PLG tersebut akan terlebih dahulu mendatangkan tim ahli dari Kementan untuk melakukan pengkajian peralatan apa yang cocok dan seperti apa penanganannya.

"Kita juga akan memberikan traktor roda empat ataupun hand tractor. Tapi dilihat terlebih dahulu mana yang cocok. Pekan depan langsung diterjunkan tim ahli. Tidak perlu lama-lama. 300 ribu hektare untuk pertanian organik itu harus terwujud," jelas Mentan.

Mentan memastikan pertanian organik tersebut nantinya akan dikelola secara profesional dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sekitar maupun pensiunan Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri yang berkecenderungan. Pemerintah akan membuat pelatihan dan pendampingan masyarakat dan benih-benih unggul.

Terkait pertanian modern, Mentan menerangkan yang pertama kali diperkenalkan ke Kalteng menggunakan sistem pertanian organik. Pertanian organik, khususnya padi sangat memberikan keuntungan yang luar biasa besar. Sebab, hasil panennya ditargetkan diekspor ke Amerika dan negara lainnya dengan harga per kg untuk beras organik berkisar 6 euro atau sekitar Rp 90 ribu hingga Rp100 ribu.

"Nantinya petani yang terlibat di pertanian organik seluas 300 ribu hektar di Kabupaten Kapuas itu tidak hanya tergabung di koperasi tapi akan dijadikan korporasi agar memudahkan akses ke perbankan hingga pemasaran ke tingkat Internasional. Itu perintah Presiden yang harus diwujudkan. Jadi, untuk tahun pertama dan kedua pertanian organik di Kabupaten Kapuas akan dibantu

Kementan. Target Kapuas jadi pusat Pertanian Organik Indonesia harus terwujud," terang Mentan.

Mentan menuturkan komitmen Kementan untuk merealisasikan hal tersebut yakni terbukti dengan telah menggelontorkan bantuan anggaran untuk Kalteng mencapai 3 kali lipat di tahun 2016 dibanding tahun 2015. Di tahun 2016, besarnya anggaran yang diturunkan yakni Rp 380 miliar, sedangkan di tahun 2015 hanya Rp 200 miliar. Kementan juga memberikan bantuan benih jagung berikut pupuknya untuk Kabupaten Kapuas sebanyak 100.000 ha.

Mentan menjelaskan program pertama yang telah dilakukan Kementan yaitu Program Upsus, yaitu meningkatkan indeks pertanaman melalui rehabilitasi irigasi dan membangun embung. Dengan begitu, dari yang biasanya tanam 1 kali menjadi 2-3 kali tanam. Meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui bantuan alat mesin pertanian (alsintan).

Tahun 2016, Kalteng mendapatkan bantuan alsintan sebanyak 1.210 unit, sehingga lahan cepat ditanami kembali. Kemudian, dengan combine harvester agar proses panen dilakukan lebih cepat dan murah serta lossis pun menurun. Begitu pun dengan pompa air agar masalah kekeringan cepat teratasi. Meningkatkan produktivitas dari 5 ton menjadi 7 hingga 10 ton melalui bantuan benih unggul.

Mentan juga menuturkan jika program pertama berhasil dan hingga dapat dibuat program pembukaan lahan pertanian baru. Dengan begitu selain menjadi mandiri pangan, Kalteng juga bisa menjadi raksasa pangan untuk Asia.

"Kami berharap produksi bahan pangan di Kalteng naik 300 persen pada 2017 sesuai angka kenaikan postur anggaran untuk sektor pertanian. Dulu Rp 200 miliar dan tahun ini Rp 528 miliar atau naik tiga kali lipat," tutur Mentan.



Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi saat konferensi pers di Kampus Kementerian Pertanian

Tiga Pakar Pangan Patahkan Pendapat Dr. Suryo Wiyono

“Pernyataan Padi hibrida yang berbakteri yang disampaikan peneliti IPB ternyata tidak tepat. Penelitian terhadap padi hibrida yang dilakukan pakar IPB tersebut hanya dilakukan di 2 lokasi yakni Kabupaten Tegal dan Blitar. Artinya hasil penelitiannya tidak mewakili karena padi hibrida ditanam dibanyak tempat yang mempunyai produktivitas tinggi hingga 13 ton/ha”

Kementerian Pertanian melalui Biro Humas dan Informasi Publik memastikan tidak ada benih padi hibrida yang ditanam di Indonesia mengandung bakteri *Burkholderia Glumae* dan telah tersebar luas di Indonesia. Padahal benih hibrida yang ditanam di Indonesia hanya ada di beberapa daerah yang tepat ditanam dengan benih tersebut.

“Benih padi hibrida impor tidak berbahaya. Pernyataan Padi hibrida yang berbakteri yang disampaikan peneliti IPB ternyata tidak tepat. Padi hibrida yang kita impor itu tidak akan mengganggu produktivitas kita,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi saat konferensi pers di Kampus Kementerian Pertanian (19/12).

Hadir pada konferensi pers, Direktur Perbenihan Kementan, Kepala Balai Besar Penelitian Padi, dan Kepala Pusat

Karantina Pertumbuhan, serta profesor riset dari Balai Besar Penelitian Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementan

Penyelenggaraan konferensi pers yang dilakukan Biro Humas dan Informasi Publik untuk membantah pernyataan Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB, Suryo Wiyono, bahwa padi Hibrida yang dimasukkan oleh Pemerintah melalui Kementan mengandung bakteri *Burkholderia Glumae* yaitu bakteri yang membuat padi tidak berisi dan membusuk.

“Pernyataan yang disampaikan pakar IPB, Dr. Suryo Wiyono sangat keliru. Alasannya karena penelitian yang dilakukan pakar IPB tersebut hanya dilakukan di 2 lokasi yakni Kabupaten Tegal dan Blitar. Artinya hasil penelitiannya tidak mewakili karena padi hibrida ditanam dibanyak tempat yang mempunyai produktivitas tinggi hingga 13 ton/ha” kata Karo Humas dan IP.

Karo Humas dan IP menuturkan Impor hibrida hanya 800 ton/tahun dan dalam 1 ha mengkonsumsi 15 kg benih. Artinya, benih itu hanya mencukupi areal lahan tanam padi seluas 50 ribu hektar. Angka tersebut hanya sebagian kecil saja dari jumlah lahan padi Indonesia sebesar 14 juta hektar.

“Total pertanaman hibrida kita hanya 0 koma sekian % dari total pertanaman padi Indonesia. Jadi, pernyataan Dr. Suryo Wiyono bahwa bakteri ini menyebar seluruh pulau Jawa sangat tidak tepat sehingga meresahkan masyarakat,” tutur Karo Humas dan IP.

Lebih lanjut Karo Humas dan IP mengasumsikan sesuai dengan data yang dimilikinya, impor hibrida itu hanya

800 ton saja. Kalau konsumsi artinya pemakaiannya per hektar 15 kilo gram, maka kira-kira hanya 50.000 hektar, dan itu terletak di beberapa provinsi dan beberapa pulau.

“50 ribu hektar ini, kalau kita bandingkan dengan luas pertanaman padi kita yakni 14 juta hektar, maka hibrida impor ini hanya mengokupasi kira-kira 0,3 persen. Jadi sangat kecil untuk menggiring satu statemen bahwa bakteri ini sudah menyebar,” ujar Karo Humas dan IP.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Penelitian Padi, Muhamad Ismail mengakui bakteri *Burkholderia Glumae* memang sudah lama ada di Indonesia sejak tahun 1987 dan merupakan bakteri type A2 yg dapat dikendalikan. Sudah 30 th dan tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Sehingga bukan baru ditemukan berdasarkan hasil penelitian Dr. Suryo Wiyono.

Kepala Balai Besar Penelitian Padi mengungkapkan dalam buku juknis organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dikeluarkan Ditjen Tanaman Pangan bahwa bakteri *Burkholderia Glumae* bukan merupakan Major Disease padi di Indonesia, sehingga belum pernah ada puso akibat bakteri tersebut.

“Selama rentang waktu antara tahun 1987 hingga sekarang, ternyata keberadaan bakteri *Burkholderia Glumae* belum pernah terdengar kabar ada kejadian yang mengakibatkan gagal panen (puso). Walau ada serangan bakteri *Burkholderia Glumae* tetapi, ternyata tidak mengganggu produksi,” ungkap Kepala Balai Besar Penelitian Padi.

Senada dengan Kepala Balai Besar Penelitian Padi, Kepala Pusat Karantina Pertumbuhan Antarjo Dikin menyebutkan bahwa bakteri *Burkholderia Glumae* memang sudah ada sejak tahun 1987. Jadi, bakteri ini masih tergolong

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) A2. Artinya sudah ada di Indonesia namun masih dapat dikendalikan.

Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Ibrahim Saragih juga menegaskan pengembangan benih padi hibrida di Indonesia telah memberikan hasil yang

bagus yakni 14 ton/ha. Kebijakan ke depan sesuai arahan Dirjen Tanaman Pangan, impor benih padi hibrida untuk sementara distop. Kebijakan itu perlu dilakukan untuk mendorong produksi benih dalam negeri dan pemanfaatan benih hibrida nasional seperti HIPA dan benih asal impor yang sudah diproduksi di dalam Negeri.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan Tim Penilai Pelepasan Varietas (TP2V), impor benih hibrida untuk satu varietas hanya diijinkan 3 tahun, selebihnya harus sudah diproduksi dalam negeri. Contoh benih hibrida yang sudah diproduksi dalam negeri adalah Sembada B9, Sembada 189 dan Mapan B02 yg mempunyai provitas 12-13 ton/ha dan disukai petani pada beberapa lokasi.



Mentan Andi Amran Sulaiman saat Rapat Koordinasi di Kementerian Perdagangan

Targetkan Harga Protein Murah Kementan Keluarkan Aturan Bobot Sapi Bakalan

“Target Kementan menyediakan protein dengan harga yang murah. Melalui relaksasi aturan bobot sapi Kementan ingin tingkatkan protein dan stabilkan harga. Regulasi revisi Permentan yang dikeluarkan Kementan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan arahan Presiden yang ingin menstabilkan harga daging agar terjangkau oleh konsumen”

dijangkau oleh masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera mengeluarkan Peraturan Menteri soal relaksasi impor sapi bakalan. Regulasi tersebut akan berupa relaksasi bobot impor sapi bakalan.

“Ini sesuai dengan arahan Presiden yang ingin menstabilkan harga daging agar terjangkau oleh konsumen. Konsumsi daging masyarakat Indonesia memang masih kurang. Dengan langkah ini diharapkan daya beli masyarakat meningkat” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi di Kementerian Perdagangan (21/12).

Mentan memaparkan berdasarkan data Kementan, konsumsi daging sapi di Indonesia per tahunnya hanya 2,5 kilogram (kg) per kapita. Berbeda dengan negara tetangga yang mencapai 25 kg sampai 30 kg per kapita.

“Target kita kan menyediakan protein dengan harga yang murah. Melalui

relaksasi kita ingin tingkatkan protein dan stabilkan harga. Regulasi ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga petani dan konsumen juga untung,” papar Mentan.

Mentan mengungkapkan Kementan tengah merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Diperkirakan, revisi tersebut bakal rampung tiga hari lagi. Revisi dikebut agar harga sapi bakalan yang diimpor dapat lebih murah ketimbang harga saat sekarang.

“Berdasarkan Permentan tersebut, berat badan sapi bakalan yang diimpor maksimal hanya 350 kilogram (kg) dan berumur maksimal 30 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan negara asal. Dalam revisinya nanti, Kementan akan merelaksasi peraturan berat maksimal sapi bakalan yang diimpor. Intinya, seluruh regulasi dikeluarkan apabila rakyat membutuhkan” ungkap Mentan.

Mentan menuturkan revisi aturan relaksasi tersebut mengenai

Dalam rangka menstabilkan harga yang mampu membuat harga daging yang ada di pasar tradisional bisa

peningkatan bobot sapi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008, bahwa izin impor sapi bakalan diperbolehkan dengan berat maksimum sapi 350 kilogram (kg).

"Selama ini, dalam menggemukkan impor sapi bakal seberat 350 kg perlu waktu selama 3-4 bulan. Ukuran berat tersebut sesuai dengan yang dipotong sekitar 550 kg. Selama menggemukkan sapi, waktu yang dibutuhkan tersebut membuat harga daging sapi terkerek tajam" tutur Mentan.

Dalam penanganan Peraturan tersebut, Mentan telah memerintahkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) untuk segera menyelesaikan revisi Permen itu dalam dua-tiga hari agar bisa keluar cepat sehingga yang penting petani untung dan konsumen untung.

"Semalam sudah di bahas aturan relaksasi, mungkin dalam Minggu ini Pak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menyelesaikannya. Jangan sampai 1 Januari. Sebelum Januari 2017 kita sudah tanda tangan," ucap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kementan melalui Ditjen PKH sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya relaksasi tersebut diharapkan akan membuat harga sapi bakalan impor turun.

"Harga sapi bakalan bisa turun sebesar US\$1 per kg. Sapi bakalan sendiri nantinya bakal diimpor dari berbagai negara, seperti India, Meksiko, Selandia Baru, dan Brasil. Sehingga, tak hanya dari Australia saja" jelas Mentan.

Menurut Mentan harga sapi bakalan dari Australia sendiri masih lebih mahal ketimbang negara lain. Distribusi impor sapi bakalan nantinya akan difokuskan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek) karena hampir 95 persen daging impor masih dikonsumsi oleh masyarakat di Jabodetabek.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan instansinya telah memberikan izin impor sapi bakalan sebanyak 152 ekor pada tahun depan. Dengan begitu, masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan ketersediaan daging sapi atau melonjaknya harga daging sapi karena kurangnya ketersediaan di pasar.

Menurut Mendag pihaknya mengupayakan harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia bisa turun AUD 1/ kg dari harga sebelumnya. Kemendag sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah Negeri Kanguru itu agar menurunkan harga sapi yang saat ini berkisar US\$ 3,5/kg.

"Penurunan harga sapi bakalan hidup ditargetkan baru bisa direalisasikan pada Januari 2017 mendatang. Pihaknya, saat

ini tengah membahas perubahan aturan bobot sapi hidup yang disyaratkan dalam pemasukan impor.

Mendag menjelaskan saat sekarang dengan regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008, pemerintah hanya mengizinkan impor sapi bakalan dengan berat maksimum 350 kg. Dengan demikian, feedloter harus menggemukkan sapi 3-4 bulan terlebih dahulu sebelum kemudian dijual ke pasar. Relaksasi pemasukan sapi bakalan yang mensyaratkan bobot maksimum 350 kg tersebut merupakan hasil negosiasi dengan pemerintah Australia,

"Jadi kita dengan Kementerian Pertanian akan ada relaksasi dari sisi berat, begitu beratnya sudah direlaksasi, maka suplai sapi dari Australia akan turun AUD 1/kg. jika harga sapi bakalan hidupnya bisa turun AUD 1/kg maka Januari tahun depan bisa, Jadi berat dari 250 kg jadi 500 kg yaitu berat maksimum yang diimpor. Digemukkan di sini nambah 50 kg jadi 550 kg, jadi masih bisa digemukkan lagi," jelas Mendag.

Mendag mengasumsikan jika harga sapi bakalan hidup yang diimpor dari Australia turun sebesar AUD 1/kg, dari hitung-hitungan sementara, harga daging sapi segar di Indonesia bisa ditekan turun di bawah Rp 100.000/kg. Saat sekarang harga daging sapi segar di pasaran masih berada di kisaran Rp 120.000/kg.

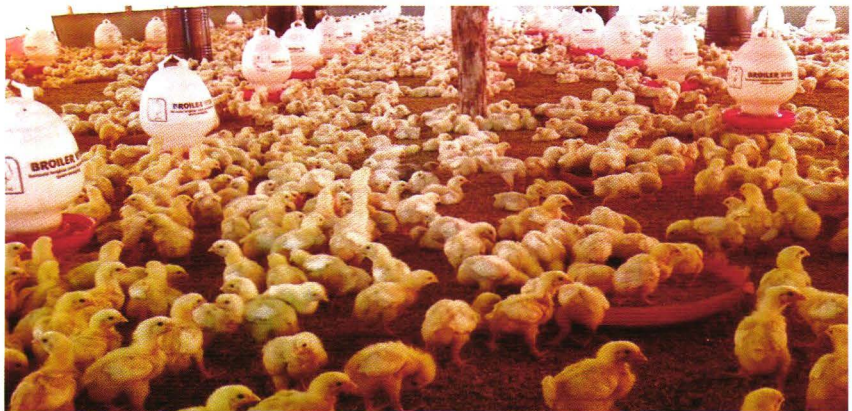


Untuk Atasi Masalah Unggas Kementan Lakukan Revisi Permentan No 26/2016



Mentan Andi Amran Sulaiman saat penandatanganan MoU terkait penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha

“Revisi Permentan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan unggas khususnya ayam ras di Indonesia. Revisi Permentan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peternak ayam petelur. Dengan adanya kesepakatan tersebut disparitas harga di sektor perunggasan yang terjadi bisa ditekan, supaya semua pihak bisa mendapat keuntungan”



Untuk mengatasi permasalahan unggas khususnya ayam ras di Indonesia, maka Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Pada revisi tersebut pemerintah mematok harga ayam dari Day Old Chick atau bibit sampai harga ayam di pasar. Tujuan revisi Permentan tersebut untuk menekan disparitas harga ayam di tingkat peternak maupun pasar.

“Revisi Permentan sebagai solusi masalah perunggasan khususnya ayam ras di Indonesia, dan adanya masukan dari KPPU dan stakeholder perunggasan saat public hearing pada akhir Oktober lalu,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat usai penandatanganan MoU terkait penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (6/12).

Dalam acara yang disaksikan Ketua KPPU, pimpinan GPPU, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementan, dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, dan perwakilan dari KPK, Bareskrim) Polri, dan Kejaksaan Agung, Mentan mengatakan revisi Permentan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peternak ayam petelur seperti pakan ternak khususnya kendala pasokan jagung, pasokan telur yang tidak terkendali dari kandang closed house, harga DOC naik lantaran menjual sebagian telur breeding menjadi telur konsumsi, dan peternak diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Revisi Permentan ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan unggas khususnya ayam ras di Indonesia. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar Kementerian Pertanian memfokuskan program untuk membuat peternak kecil untung. Hal ini sama halnya pada petani padi dan jagung yang telah mendapat keuntungan. Tujuan revisi Permentan tersebut untuk menekan disparitas harga ayam di tingkat peternak maupun pasar. Kami membuat kesepakatan sekaligus merevisi Permentan untuk menstabilkan harga

di tingkat konsumen dan peternak. Jadi disparitas harga yang tinggi kami tekan” kata Mentan.

Mentan menegaskan, dengan adanya kesepakatan tersebut pihak Kementan berharap agar disparitas harga di sektor perunggasan yang selama ini terus terjadi bisa ditekan, supaya semua pihak bisa mendapat keuntungan dari sektor usaha perunggasan tersebut.

Menurut Mentan sebelumnya harga DOC di tingkat produsen berada di level Rp 5.000-6.000 per ekor. Dengan ditandatanganinya revisi Permentan Nomor 26 Tahun 2016, maka harga DOC dipatok sebesar Rp 4.800 per ekor. Kemudian, harga ayam di kandang juga diatur sebesar Rp 18.000 per ekor, sehingga harga daging ayam di pasar per kilogram (kg) menjadi Rp 32.000.

“Seluruh produsen DOC atau bibit ayam sampai ke pasar sudah sepakat untuk mengikuti besaran harga yang sudah ditetapkan di Permentan Nomor 26 Tahun 2016 yang sudah direvisi. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan harga tersebut. Ketentuan harga patokan tersebut, berlaku mulai

hari ini “ucap Mentan.

Mentan menjelaskan dengan dilakukannya penetapan harga dalam kesepakatan itu Kementan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan MoU pengawasan dan pendampingan penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras di Indonesia.

“Selama ini 80% usaha peternakan dikuasai perusahaan integrasi dan hanya 20% dikuasai peternak mandiri, sehingga sulit bersaing baik dari segi penguasaan sarana produksi dan persaingan usaha,” jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa dengan adanya kesepakatan pada perubahan revisi Permentan maka diharapkan tidak akan terjadi lagi gejolak harga ayam di pasaran karena semua produsen ayam sudah menyetujui penetapan harga ayam oleh pemerintah.

Perunggasan merupakan sektor yang cukup sensitif di sektor Kementerian Pertanian.

“Sampai saat ini gejolak di sektor unggas selalu muncul mulai dari masalah DOC, pemeliharaan ayam ras, hingga masalah harga penjualan di pasar. Hal itu jelas membuat para pelaku usaha di sektor perunggasan sering turun ke jalan menuntut keadilan dari pemerintah. Dengan adanya deklarasi bersama ini ke depannya kita harapkan tidak ada lagi demo-demo peternak” jelas Mentan.

Mentan mengaku tidak menginginkan ada peternak unggas turun ke jalan melakukan demo masalah perunggasan. Makanya saat sekarang pihak Kementan membuat regulasi dan aturan yang jelas. Melalui deklarasi bersama yang telah dilakukan maka dapat terjalin kesepakatan bersama antara pemerintah, KPPU, dan para pelaku usaha di sektor

peternakan untuk tetap menjaga harga unggas.

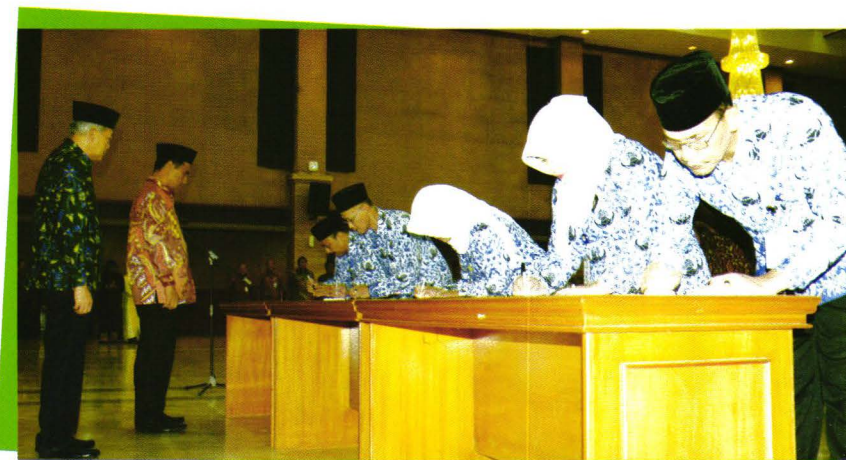
“Kami membahas bersama pengaturan door price dan ceiling price. Tidak hanya harga jual ayam di pasar, harga DOC, harga pakan juga kita atur. Semua ini kita atur sehingga ke depan tidak ada lagi kegaduhan di sektor perunggasan, segala upaya menjaga harga harus kita lakukan baik di tingkat peternak maupun di tingkat konsumen,” ujar Mentan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan, DOC yang akan di jual ke peternak mandiri semuanya harus yang sudah SNI jadi DOC yang dijual perusahaan integrasi patokan harganya sama. Tidak ada lagi DOC grade semuanya harus sudah SNI yang sudah ditetapkan pemerintah.

Tetapkan Langkah Aksi Percepatan Kegiatan Untuk Peningkatkan Produksi Dari Kegiatan

“Pejabat yang baru dilantik harus segera melakukan konsolidasi internal dan menetapkan langkah aksi percepatan kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi komoditas strategis, peningkatan produksi mutu dan ketersediaan benih, peningkatan nilai tambah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan”

Sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi sekaligus menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian harus selalu dinamis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan dimana tugas-tugas tersebut membutuhkan pejabat yang pekerja keras memiliki komitmen tinggi, dan mempunyai leadership yang tangguh, maka Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 20 Desember 2016 di kampus Kementerian Pertanian.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 839/Kpts/KP.230/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, telah ditetapkan 21 (Dua Puluh Satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian yang meliputi 9 (sembilan) pejabat promosi dan 12 pejabat mutasi. Kesembilan pejabat yang dipromosikan tersebut adalah pegawai yang terpilih dan telah ditetapkan dari hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian Tahun 2016.

Adapun nama 21 Pejabat Eselon II yang dilantik Menteri Pertanian antara lain: 1) Lingkup Badan Ketahanan Pangan yaitu Dr.Drs. Benny Rachman M.Si sebagai Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Dr. Ir. Riwantoro, M.M sebagai Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. 2) Lingkup Inspektorat Jenderal yaitu Ir. Widono

MM sebagai Inspektur III; Ir. Alwi Munsir MM sebagai Inspektur II; Ir. Susanto MM sebagai Inspektur I; Ir. Bambang Pamuji MM sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal; drh. IG Made Ngr Kuswandana MM sebagai Inspektur IV. 3) Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Ir. Sri Kuntarsih MM sebagai Direktur Pembiayaan Pertanian. 4) Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu drh. Fajar Sumping Tjatur Rasa Ph.D sebagai Direktur Kesehatan Hewan; Dr. Ir. Nasrullah M.Sc sebagai Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; drh. Enuh Raharjo Djusa M.Sc. Ph.D sebagai Kepala Pusat Veteriner Farma; drh. Sri Mukartini M.App Sc sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; drh. Bagoes Poermadjaja sebagai Kepala Balai Besar Veteriner Wates 5) Lingkup Ditjen Perkebunan yaitu

Ir. Ali Jamil MP. Ph.D sebagai Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar; Ir. H. Muhammad Anas M.Si sebagai Pj Direktur Perbenihan Perkebunan; Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko MS sebagai Kepala Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, 6) Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yaitu Ir. Bambang Sugiharto M.Eng Sc sebagai Pj. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan; Ir. Rita Mezu MM sebagai Pj. Direktur Aneka Kacang dan Umbi, 7) Lingkup Ditjen Hortikultura yaitu Ir. Sukarman sebagai Pj. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, 8) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Dr. Ir Syaifuddin sebagai Pj. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, 9) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yaitu Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti M.Si sebagai Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner,.

Khusus kepada 9 pejabat yang baru dilantik yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktur Perbenihan Perkebunan, Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Pembiayaan Pertanian, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner, Inspektur I dan Inspektur IV, Mentan mengucapkan selamat bekerja dan meminta para 9 pejabat sekalian tersebut segera melakukan konsolidasi dengan setiap jajaran instansi terkait dan menggerakkan segenap sumberdaya yang berada di setiap Unit Kerja yang dipimpinnya.

"Pejabat yang baru segera melakukan

konsolidasi internal dan menetapkan langkah aksi percepatan kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi komoditas strategis, peningkatan produksi mutu dan ketersediaan benih; peningkatan nilai tambah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan kepada para Pejabat Mutasi agar segera melakukan konsolidasi internal untuk menetapkan upaya khusus peningkatan kinerja program dan kegiatan strategis dalam rangka percepatan peningkatan produksi dan swasembada pangan" ucap Mentan.

Mentan menyatakan rasa syukurnya atas hasil kinerja Kementerian Pertanian yang telah mengindikasikan keberhasilannya yang ditunjukkan dengan: (1) pasokan pangan cukup stabil dengan produksi pangan utamanya beras pada tahun 2015 naik 6,64% dan pada tahun 2016 naik 4,97% meskipun dalam kondisi iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina. Selama dua tahun tersebut produksi naik 8,3 juta ton setara Rp 38 5 triliun; (2) pada tahun 2016 tidak ada rekomendasi dan ijin impor beras premium; (3) hambatan distribusi dan permainan perdagangan dapat di redam; dan (4) berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) 2016 ketahanan pangan Indonesia meningkat terbesar di dunia dengan indeks 2,7 dan aspek ketersediaan pangan naik tinggi di peringkat 66.

"Selama lebih dari dua tahun, kita telah bekerja keras melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan dan peningkatan produksi

komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah. Berdasarkan Angka Ramalan II BPS dan Kementerian Pertanian, produksi padi tahun 2016 sebanyak 79,14 juta ton GKG meningkat 3,74 juta ton atau 4,97% dibandingkan tahun 2015. Produksi jagung sebanyak 23,16 juta ton pipilan kering, meningkat 3,55 juta ton atau 18,11% dibandingkan tahun 2015. Capaian kinerja tersebut harus terus kita tingkatkan pada tahun 2017. Semua itu tidak dapat kita capai apabila kita bekerja biasa-biasa saja" kata Mentan

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa fokus program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah (1) percepatan peningkatan produksi dan swasembada padi melalui peningkatan luas tambah tanam (LTT) dan peningkatan IP padi melalui pengembangan sumber - sumber air (embung, dan parit, long storage, sumur tanah dangkal dan pompanisasi air sungai) pada lahan seluas 4 juta Ha bekerjasama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pemanfaatan dana desa, (2) percepatan peningkatan produksi jagung melalui program perluasan areal jagung 3 juta hektar dengan sistem integrasi jagung-kebun/hutan dan kemitraan dengan petani jagung, (3) upaya khusus (UPSUS) Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) melalui 18 dengan target 4 juta akseptor dan 3 juta ekor diantaranya wajib bunting, serta (4) pengembangan pangan dan pertanian di daerah perbatasan sebagai perwujudan upaya membangun dan pinggiran.





